



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2022**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

JALAN RASAKUNDA – PANGKALPINANG TELP./FAX. (0717) - 437755

Website: <http://www.bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id>, email: [info@bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id](mailto:info@bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dapat diselesaikan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang. Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Atas tersusunnya Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukanya. Semoga Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 ini nantinya dapat menjadi bahan dalam penetapan Rencana Kerja (Renja) Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022.

Pangkalpinang, Juli 2021

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,



**EKO BUDI HARTONO, S.Sos., M.Si**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196410271985031004

# DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II    HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDMD TAHUN LALU .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDMD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD.....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD.....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP.....	25
BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	35
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDMD .....	35
3.3 Program dan Kegiatan .....	38
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	39
BAB V    PENUTUP .....	56

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja BKPSDMD Tahun 2020.....	11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDMD Kota Pangkalpinang .....	22
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.....	26
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDMD.....	36
Tabel 3.2 Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 .....	37
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDMD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 .....	43
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas BKPSDMD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 .....	52

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah memberikan informasi tentang rencana program kegiatan perangkat daerah satu tahun ke depan. Sedang tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD adalah sebagai acuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.



## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2022, meliputi :

BAB I       Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II       Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Akhir OPD

BAB III      Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV      Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB V       Penutup

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDMD

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) serta memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 melaksanakan 5 (Lima) program dan 49 (Empat Puluh Sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.368.274.594,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

#### A. Realisasi Program / Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui kegiatan :
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
  - 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan target kinerja 7 jasa dengan capaian kinerja 7 jasa (100%).
  - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
  - 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).

- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
  - 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
  - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
  - 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
  - 9) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
  - 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui kegiatan :
    - 1) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan target kinerja 1 kali dengan capaian kinerja 1 kali (100%).
    - 2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan target kinerja 5 unit dengan capaian kinerja 5 unit (100%).
  3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan :
    - 1) Peninjauan Masa Kerja dan Peningkatan Pendidikan PNS dengan capaian kinerja 25 orang dengan capaian kinerja 25 orang (100%)
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan :
    - 1) Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 3 jenis dengan capaian kinerja 3 jenis (100%).

- 2) Penyusunan Laporan Semesteran/Prognosis Keuangan dengan target kinerja 1 jenis dengan capaian kinerja 1 jenis (100%).
  - 3) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan target kinerja 1 jenis dengan capaian kinerja 1 jenis (100%).
  - 4) Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA) dengan target kinerja 3 jenis dengan capaian kinerja 3 jenis (100%).
  - 5) Forum Perangkat Daerah dengan target kinerja 30 orang dengan capaian kinerja 30 orang (100%).
5. Program Kepegawaian Daerah melalui kegiatan :
- 1) Proses Penyelesaian Cuti bagi ASN Kota Pangkalpinang dengan target kinerja 10 orang dengan capaian kinerja 10 orang (100%).
  - 2) Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS dengan target kinerja 10 kali dengan capaian kinerja 10 kali (100%).
  - 3) Seleksi Penerimaan PNS dari Pelamar Umum dengan target kinerja 166 orang dengan capaian kinerja 166 orang (100%).
  - 4) Pengelolaan Administrasi CASN menjadi ASN dengan target kinerja 250 orang dengan capaian kinerja 250 orang (100%).
  - 5) Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dengan target kinerja 600 orang dengan capaian kinerja 600 orang (100%).
  - 6) Pengelolaan Data ASN Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dengan target kinerja 3000 data dengan capaian kinerja 3000 data (100%).
  - 7) Penyusunan Formasi Pegawai dengan target kinerja 250 formasi dengan capaian kinerja 250 formasi (100%).
  - 8) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memiliki Masa Kerja 10, 20, 30 Tahun dengan target kinerja 200 orang dengan capaian kinerja 200 orang (100%).

- 9) Pengelolaan Administrasi Pensiun ASN dengan target kinerja 90 SK dengan capaian kinerja 90 SK (100%).
- 10) Penyelesaian Administrasi Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taperum, dan Taspen dengan target kinerja 150 kartu dengan capaian kinerja 150 kartu (100%).
- 11) Pengelolaan dan Pengembangan Website Kepegawaian dengan target kinerja 1 website dengan capaian kinerja 1 website (100%).
- 12) Pengelolaan Administrasi dalam Jabatan Fungsional dengan target kinerja 30 ASN dengan capaian kinerja 30 ASN (100%).
- 13) Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan target kinerja 3 kali dengan capaian kinerja 3 kali (100%).
- 14) Pengelolaan dan Pengembangan Elektronik Sistem Manajemen Informasi Layanan Kepegawaian Daerah (E-Smile) dengan target kinerja 1 jenis data dengan capaian kinerja 1 jenis data (100%).
- 15) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dengan target kinerja 100 ASN dengan capaian kinerja 100 ASN (100%).
- 16) Pengelolaan E-LHKPN dengan target kinerja 43 orang dengan capaian kinerja 43 orang (100%).

B. Realisasi Program / Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan:
  - 1) Diklat Formal PNS dengan target kinerja 10 orang dengan capaian kinerja 7 orang (70%).
2. Program Kepegawaian Daerah melalui kegiatan :
  - 1) Pendidikan dan Penjurangan Struktural bagi PNS dengan capaian kinerja 5 orang dengan capaian kinerja 0 orang, dikarenakan anggaran dialihkan untuk penanganan kasus Covid-19 Kota Pangkalpinang (0%).

- 2) Uji kompetensi bagi ASN Kota Pangkalpinang dengan capaian kinerja 18 orang dengan capaian kinerja 17 orang (94%).
- 3) Peningkatan dan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara dengan capaian kinerja 6 kasus dengan capaian kinerja 5 kasus (83%).
- 4) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS dengan capaian kinerja 7 orang dengan capaian kinerja 1 orang (14%).

Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
RENJA BKPSMDM Kota Pangkalpinang  
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN IV

No	Sebaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang devakusi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang devakusi 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2019 s.d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah	
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	12(a) = 12/7 x 100%	13 = 8 + 12	14 = 13 x 100%	15										
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik berkualitas	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																							
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi	72%	2.879.433,356	83%	419.272,899	128	334.623.141	36	91.889.733	36	58.664.355	30	73.377.348	30	102.770.226	120	326.663.662	100%	96%	213	945.965.751	43%	31%
1		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	821.304.050	12	43.572.467	12	47.500.000	3	10.924.865	3	3.666.355	3	7.206.075	3	21.506.825	12	43.244.120	100%	91%	24	86.816.587	40%	14%
2		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia (jasa)	60	448.870.000	12	99.790.000	12	131.840.000	3	24.800.000	3	40.660.000	3	31.480.000	3	34.500.000	12	131.240.000	100%	100%	24	231.030.000	40%	51%
3		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	60	270.050.000	12	50.515.000	12	48.890.000	3	10.985.000	3	12.450.000	3	10.965.000	3	12.480.000	12	46.860.000	100%	100%	24	97.375.000	40%	36%
4		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (unit/tahun)	60	150.000.000	32	29.335.000	12	10.000.000	3	-	3	-	3	4.995.000	3	4.945.000	12	9.940.000	100%	99%	44	39.275.000	73%	26%
5		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli (jenis)	60	74.700.000	36	14.700.000	12	10.000.000	3	3.241.000	3	-	3	2.023.000	3	4.736.000	12	10.000.000	100%	100%	48	24.700.000	80%	33%
6		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang dibeli (jenis) dan Jumlah lembar fotocopy (Eksemplar)	60	102.704.500	12	20.412.850	12	4.550.000	3	1.575.000	3	-	3	1.575.000	3	1.400.000	12	4.550.000	100%	100%	24	24.962.850	40%	24%
7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli (jenis)	60	30.000.000	11,0	5.900.000	12	2.233.000	3	748.000	3	-	3	741.000	3	466.000	12	1.853.000	100%	87%	23	7.943.000	38%	26%
8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani	60	41.000.000	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0%	0%
9		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	60	20.000.000	1	3.880.000	12	2.560.000	3	320.000	3	-	3	0	3	2.180.000	12	2.500.000	100%	98%	13	6.180.000	22%	31%
10		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia (jenis)	60	30.000.000	10	5.960.000	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	1	5.960.000	2%	20%
11		Penyediaan makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)	60	94.870.000	12	9.910.000	12	4.440.000	3	-	3	1.940.000	3	0	3	1.000.000	12	2.940.000	100%	66%	24	12.850.000	40%	14%
12		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti (kali)	60	1.195.135.900	55	335.406.772	12	74.640.141	3	38.517.888	3	-	3	14.392.273	3	19.556.401	12	73.466.542	100%	98%	67	408.873.314	112%	34%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																			<b>96%</b>	<b>87%</b>		<b>35%</b>	<b>24%</b>		
<b>Profil Kinerja</b>																			<b>R</b>	<b>R</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>		
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan/dibangun/diperbaiki	83	1.148.789.808	6	182.843.264	7	148.289.888	1,98	21.858.948	2	26.839.654	2	23.784.981	1	62.722.483	6	136.521.791	98%	97%	12	304.573.062	17%	27%
1		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	5	133.200.000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0	0	-	0%	0%
2		Pengadaan Mebelur	Jumlah mebelur (unit)	28	34.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0%	0%
3		Peneliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (unit)	5	200.000.000	1	43.350.000	1	21.300.000	0,00	5.025.000	0	6.225.000	1,00	5.025.000	-	5.025.000	1,00	21.300.000	100%	100%	2	64.650.000	40%	32%

4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)	25	700,000,000	5	124,995,294	5	118,988,000	1.00	15,825,960	2	20,414,454	1	20,736,901	1	57,247,483	5	115,227,795	100%	97%	10	239,923,062	40%	34%
5	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan rehablasi sedang/berat	4	31,000,000	-	-	0	0									0	0	0	0	0	0%	0%	
6	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang terseda	2	50,500,000	-	-	0	0									0	0	0	0	0	0%	0%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			57%	74%		12%	12%	
Predikat Kinerja																			R	R		SR	SR	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang menaati peraturan yang berlaku	45	24,548,800	45	27,990,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	27,990,000	100%	98%	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Set)	45	28,500,000	45	27,900,000	-	0									0	0	0	0	45	27,900,000	100%	98%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			8.00%	8.95%		87%	85%	
Predikat Kinerja																			SR	SR		R	R	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan/workshop/peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1,182	778,275,388	170	154,531,171	81	28,658,888	7	9,488,888	8	8	6	8	25	18,561,000	32	27,961,000	40%	98%	202	162,482,171	18%	23%
1	Diklat formal PNS	Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal (Oransi)	100	225,000,000	20	38,089,867	10	8,400,000	7	9,400,000	0	0	0	0	0	0	7	9,400,000	70%	100%	27	48,489,867	27%	22%
2	Ujian Dinas dan Ujian Kenakan pangkat penyesuaian (jazah)	Jumlah pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian (jazah) (orang)	500	229,332,800	100	81,928,004	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	81,928,004	20%	36%	
3	Peninjauan masa kerja dan peningkatan Pendidikan PNS	Jumlah ASN yang mendapat tambahan masa kerja dan peningkatan pendidikan/oransi)	150	161,943,000	50	33,513,500	25	18,250,000	0	0	0	0	0	0	25	18,561,000	25	18,561,000	100%	96%	75	52,074,500	50%	32%
4	Sosialisasi P4GN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi P4GN	172	40,000,000	-	-	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
5	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (Set)	180	122,000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			42%	74%		16%	16%	
Predikat Kinerja																			SR	R		SR	SR	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terpelaksananya laporan perencanaan, evaluasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan	48	81,988,888	8	15,604,888	8	22,738,888	8	5,948,888	1	4,448,888	1	3,128,888	0	0	8	22,500,000	100%	95%	16	39,104,000	40%	44%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD yang dibuat (Jenis)	Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD yang dibuat (Jenis)	15	22,000,000	3	2,000,000	3	4,940,000	3.00	4,940,000	0	0	0	0	0	0	3	4,940,000	100%	100%	6	6,940,000	40%	32%
2	Penyusunan laporan semesteran/ prognosis keuangan yang dibuat (Jenis)	Jumlah jenis laporan semesteran/ prognosis keuangan yang dibuat (Jenis)	5	22,000,000	1	2,000,000	1	4,290,000	0.00	0	0	0	1	4,060,000	0	0	1	4,060,000	100%	95%	2	6,060,000	40%	28%
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun yang dibuat (Jenis)	5	22,000,000	1	2,000,000	1	5,000,000	0.00	0	1	4,440,000	0	560,000	0	0	1	5,000,000	100%	100%	2	7,000,000	40%	32%
4	Penyusunan rencana kerja, RKA dan DPA	Jumlah jenis Rencana, RKA dan DPA yang dibuat (Jenis)	15	22,000,000	3	2,000,000	3	5,000,000	3.00	5,000,000	0	0	0	0	0	0	3	5,000,000	100%	100%	6	7,000,000	40%	32%
5	Forum perangkat daerah	Jumlah permangku kepentingan yang hadir	120	40,000,000	-	-	30	3,500,000	0.00	0	0	0	30	3,500,000	0	0	30	3,500,000	100%	100%	30	3,500,000	25%	9%
6	Penyusunan RENSTRA	Jumlah jenis laporan perencanaan jangka menengah yang disusun	4	11,000,000	-	-	-	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
7	Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah dokumen hasil pengendalian intern, OED	5	50,000,000	1	8,804,000	1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,604,000	20%	17%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			79%	85%		27%	21%	
Predikat Kinerja																			R	R		SR	SR	
6	Program Peningkatan Pelaksanaan KORPRI	Persentase terlaksananya upaya pembuktian pelayanan KORPRI	150	90,988,888	150	283,471,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	283,471,200	100%	315%	
1	Pembinaan Pegawai KORPRI	Jumlah pelaksanaan peringatan hari KORPRI (kal)	150	90,000,000	150	283,471,200	-	0									0	0	0	0	150	283,471,200	100%	315%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			8.00%	8.95%		87%	218%	
Predikat Kinerja																			SR	SR		R	R	
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Teknis)	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	320	2,773,471,388	318	2,285,248,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	2,285,248,628	97%	90%	
1	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi calon PNS daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan (orang)	288	2,575,471,000	288	2,288,522,798	-	0									0	0	0	0	288	2,288,522,798	100%	89%
2	Sosialisasi reformasi birokrasi aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi reformasi birokrasi aparatur	60	198,000,000	50	96,717,830	-	0									0	0	0	0	50	96,717,830	83%	49%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			8.00%	8.95%		70%	34%	
Predikat Kinerja																			SR	SR		R	R	
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase terlaksananya upaya pembinaan dan pengembangan aparatur	2,848	1,895,888,888	2,834	1,623,337,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2834	1,623,337,831	100%	140%	



1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah pelaksanaan pembinaan karir PNS (Kali)	1	100,000,000	1	119,107,540	-	0							0	0	0	0	1	119,107,540	100%	119%		
2	Pengembangan/ pembangunan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	Jumlah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) yang dikembangkan (Sistem)	1	230,000,000	1.00	298,173,062	-	0							0	0	0	0	1	298,173,062	100%	130%		
3	Penyusunan formasi pegawai	Jumlah data formasi pegawai yang disusun (Dokumen)	621	23,000,000	621	40,481,247	-	0							0	0	0	0	621	40,481,247	100%	178%		
4	Pengelolaan Administrasi Penarikan PNS	Jumlah SK penarikan yg diterbitkan (Orang)	150	80,000,000	148	85,295,487	-	0							0	0	0	0	148	85,295,487	99%	95%		
5	Penyelesaian Administrasi Karpeg, Karis/ Karu, Taperum, Aakes dan Taspen yg diterbitkan (karu)	Jumlah Karpeg, Karis/ Karu, Taperum, Aakes dan Taspen yg diterbitkan (karu)	300	30,000,000	300	25,563,500	-	0							0	0	0	0	300	25,563,500	100%	85%		
6	Pengelolaan dan Pengembangan Website Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan(web)	1	50,000,000	1	48,558,000	-	0							0	0	0	0	1	48,558,000	100%	99%		
7	Pengelolaan Administrasi CPNS meried PNS	Jumlah pelet sarana pengangkatan CPNS meried PNS(kali)	288	25,000,000	288	18,592,004	-	0							0	0	0	0	288	18,592,004	100%	78%		
8	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner (kasus)	5	25,000,000	5	37,727,300	-	0							0	0	0	0	5	37,727,300	100%	151%		
9	Pengelolaan Administrasi dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional (org)	100	30,000,000	100	48,610,591	-	0							0	0	0	0	100	48,610,591	100%	165%		
10	Seleksi Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum	Jumlah Pelaksanaan penerimaan CPNS dari Pelamar umum (kali)	250	5,000,000	250	194,426,000	-	0							0	0	0	0	250	194,426,000	100%	3889%		
11	Pengelolaan administrasi kenahlan pangkat otomatis PNS	Jumlah SK pangkat PNS yang diterbitkan (Orang)	611	170,000,000	611	161,451,020	-	0							0	0	0	0	611	161,451,020	100%	95%		
12	Pemberian penghargaan bagi PNS yang memiliki masa kerja 10, 20, 30 Tahun	Jumlah PNS yang menerima penghargaan (Orang)	200	20,000,000	200	10,680,000	-	0							0	0	0	0	200	10,680,000	100%	53%		
13	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izn Belajar bagi PNS	Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar (orang)	5	180,000,000	5	142,413,170	-	0							0	0	0	0	5	142,413,170	100%	79%		
14	Pengelolaan dan pengembangan elektronik sistem manajemen informasi layanan kepegawaian daerah (e SMILE)	Jumlah jenis data yang tersusun	1	500,000	1	63,510,100	-	0							0	0	0	0	1	63,510,100	100%	12702%		
15	Penyusunan NSPK	Jumlah NSPK yang selesai disusun	2	500,000	1	20,340,400	-	0							0	0	0	0	1	20,340,400	50%	4068%		
16	Workshop pengembangan kompetensi PNS	Jumlah ASN yg mengikuti workshop pengembangan kompetensi	62	500,000	70	70,030,900	-	0							0	0	0	0	70	70,030,900	113%	14006%		
17	Pengukuran indeks profesional ASN	Jumlah ASN yang akan dinilai	70	500,000	70	70,184,300	-	0							0	0	0	0	70	70,184,300	100%	14037%		
18	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang terfasilitasi (Kali)	1	115,000,000	1	165,192,410	-	0							0	0	0	0	1	165,192,410	100%	144%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																8.00%	8.00%			89%	359%			
Predikat Kinerja																SR	SR			R	R			
9	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	25,326	26,805,332,808	1,857	4,896,585,841	5,217	1,841,882,453	819	374,136,388	2,253	412,322,715	8	177,824,839	1,642	698,281,728	4734	1,661,765,602	91%	90%	7791	5,752,271,263	30%	28%
1	Pendidikan dan penjurangan struktural bagi PNS	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan penjurangan struktural	287	6,228,200,000	-	-	5	6,118,800	0	6,118,800	0	0	0	0	-	-	0	6,118,800	0%	100%	0	6,118,800	0%	0%
2	Pengukuran nilai IKM pelayanan kepegawaian	Jumlah OPD yang dikufusertakan dalam menilai pelayanan kepegawaian	120	80,000,000	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-	-	0	-	0	0	-	0%	0%	
3	Pengukuran indeks profesional ASN	Jumlah ASN yang akan dinilai	3,222	200,000,000	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-	-	0	-	0	0	-	0%	0%	
4	Prosesi pemulangan ASN yang meninggal dunia	Jumlah proses pemulangan ASN yang meninggal dunia	48	229,000,000	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-	-	0	-	0	0	-	0%	0%	
5	Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan bagi Camat	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan bagi Camat	16	31,000,000	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-	-	0	-	0	0	-	0%	0%	
6	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	16	31,000,000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	-	0%	0%	
7	Proses penyelesaian cuti bagi ASN Kota Pangkalpinang	Jumlah penyelesaian Cuti ASN Kota Pangkalpinang	46	125,000,000	-	-	10	27,350,000	0	0	10	5,000,000	0	1,000,000	-	18,400,000	10	24,400,000	100%	89%	10	24,400,000	22%	20%

8	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	60	800,000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
9	Pelatihan Dasar Bagi CASN Daerah	Jumlah CASN yang mengikuti Pelatihan Dasar	200	1,700,000,000	200	2,288,522,796	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	2,288,522,796	134%	135%		
10	Bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah	Jumlah ASN yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah	125	226,000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
11	Uji Kompetensi bagi ASN Kota Pankajenean	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	112	351,000,000	-	-	18	113,900,600	17	111,975,800	0	0	0	1,925,000	-	-	17	113,900,600	94%	100%	17	113,900,600	15%	32%
12	Workshop Standarisasi dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mempunyai sertifikasi sesuai dengan kompetensi keahlian dalam jabatan	50	50,000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
13	Pelatihan Pengukuran Indeks Profesional ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Pengukuran Indeks Profesional ASN	62	50,000,000	70	70,184,300	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70,184,300	113%	140%		
14	Workshop Pengembangan Kompetensi PNS	Jumlah ASN yang mengikuti workshop Pengembangan Kompetensi	242	270,000,000	70	70,030,900	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70,030,900	25%	26%		
15	Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang	40	50,000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
16	Sosialisasi reformasi birokrasi aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi reformasi birokrasi	240	800,000,000	50	96,717,830	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	96,717,830	21%	12%		
17	Pembekalan dan pelatihan kewirausahaan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun	Jumlah ASN yang mendapat pembekalan dan pelatihan	180	180,000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
18	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah pelaksanaan pembinaan karir ASN	24	540,000,000	4	118,107,540	10	106,500,000	0	0	6	10,700,000	0	2,400,000	4	82,925,000	10	96,025,000	100%	90%	14	215,132,540	58%	40%
19	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	60	180,000,000	5	37,727,300	6	24,600,000	1	10,277,800	2	12,300,000	0	0	2	1,875,000	5	24,452,800	83%	99%	10	62,180,100	13%	39%
20	Seleksi penerimaan CASN dari pelamar umum	Jumlah peserta seleksi CASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	1,000	200,000,000	250	194,426,000	188	431,578,782	188	96,566,300	0	116,868,500	0	5,800,000	-	182,141,351	168	401,176,161	100%	93%	416	595,602,161	42%	298%
21	Pengelolaan administrasi CASN menjadi ASN	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	1,000	180,000,000	250	19,562,004	250	19,900,000	0	0	250	6,200,000	0	12,705,000	-	-	250	18,900,000	100%	96%	500	38,492,004	50%	24%
22	Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	2,400	680,000,000	611	161,451,020	600	125,239,500	150	15,026,600	49	18,850,000	0	2,585,000	208	74,941,627	407	112,412,227	68%	90%	1018	273,863,247	42%	40%
23	Pengelolaan Data ASN sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola	12,300	960,000,000	1	298,173,062	3,000	246,389,194	500	52,725,000	1,200	67,194,194	0	61,875,000	1,300	64,425,000	3000	246,289,194	100%	100%	3001	544,462,256	25%	57%
24	Penyusunan formasi pegawai	Jumlah formasi yang diusulkan	1,000	100,000,000	621	40,481,247	250	9,193,500	0	1,200,000	250	5,293,500	0	2,700,000	-	-	250	9,193,500	100%	100%	871	49,674,747	87%	50%
25	Pemberian penghargaan bagi PNS yang memiliki masa kerja 10, 20, 30 Tahun	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	800	160,000,000	200	10,680,000	200	15,866,000	0	0	200	4,200,000	0	0	-	8,950,000	200	13,150,000	100%	83%	400	23,830,000	50%	15%
26	Pengelolaan Administrasi Penakun PNS	Jumlah SK penakun yg diterbitkan	400	340,000,000	148	85,295,487	90	65,500,000	0	2,981,000	64	14,800,000	0	4,450,000	26	36,968,000	90	59,190,000	100%	90%	238	144,494,487	60%	42%
27	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	21	700,000,000	5	142,413,170	7	43,010,600	0	0	1	26,260,800	0	2,350,000	-	-	1	28,610,600	14%	67%	6	171,023,770	25%	24%
28	Penyelesaian Administrasi Karpeg, Karis/Karis, Taperum, Askes dan Taspen yg diterbitkan	Jumlah Karpeg, Karis/Karis, Taperum, Askes dan Taspen yg diterbitkan	600	140,000,000	300	25,563,500	150	11,750,000	0	0	150	3,400,000	0	0	-	6,550,000	150	9,950,000	100%	85%	450	35,513,500	75%	25%
29	Pengelolaan dan Pengembangan Website E-nomnastin	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	8	220,000,000	1	48,558,000	2	24,425,000	0	0	2	18,000,000	0	6,175,000	-	-	2	24,175,000	100%	90%	3	73,733,000	38%	34%
30	Penilaian Arsip	Jumlah arsip kepegawaian yang ditata	200	80,000,000	-	-	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
31	Pengelolaan Administrasi Dalam Jabatan Fungsional (50)	Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional	120	180,000,000	100	49,610,591	30	40,000,000	5	4,183,000	25	11,800,000	0	2,877,500	-	20,282,500	30	39,143,000	100%	98%	130	88,753,591	108%	55%
32	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang terfasilitasi	4	640,000,000	1	105,192,410	3	245,224,159	0	11,857,100	1	45,065,893	0	67,987,359	1	38,905,000	2	163,615,142	67%	67%	3	328,807,552	75%	51%
33	Seleksi Mutasi PNS (Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar)	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi masuk dan keluar	120	200,000,000	-	-	30	6,811,238	0	0	0	6,811,238	0	0	-	-	0	6,811,238	0%	100%	0	6,811,238	0%	3%
34	Pengelolaan dan Pengembangan Elektronik Sistem Manajemen Informasi Layanan Kepegawaian Daerah (E-SMILE)	Jumlah jenis data yang tersusun	4	500,000,000	1	63,510,100	1	118,300,000	0	58,500,000	0	0	0	200,000	1	58,500,000	1	116,200,000	100%	98%	2	179,710,100	50%	38%
35	Pembinaan pegawai KORPRI	Jumlah pelaksanaan HUT KORPRI	4	360,000,000	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0%	0%		
36	Penyelenggara MTQ KORPRI	Jumlah cabang yang dilombakan	17	465,000,000	-	-	5	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0%	0%		

37	Pelebaran Olahraga KORPRI	Jumlah cabang yang dibombakan	2	100,000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
38	Pembinaan mental dan rohani PNS	Jumlah pelaksanaan pembinaan	4	200,000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
39	Penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Kepegawaian	Jumlah NSPK yang selesai disusun	40	220,000,000	1	20,340,400	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20,340,400	3%	9%	
40	Gala Karya	Jumlah tim pembinaan olahraga KORPRI	26	1,000,000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
41	Pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	Jumlah ASN berprestasi yang menerima penghargaan	20	140,000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
42	Rakor kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Kepegawaian	200	90,000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
43	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Jazrah	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian jazrah	500	229,332,800	100	81,928,004	100	113,000,000	0	0	0	0	0	100	102,418,240	100	102,418,240	100%	91%	200	184,346,244	40%	80%	
44	Pengelolaan E-LHKPN	Jumlah Kepatuhan pelaporan LHKPN secara elektronik	172	560,000,000	-	-	43	47,825,100	0	4,925,100	43	38,900,000	0	2,100,000	-	-	43	45,625,100	100%	96%	43	45,625,100	25%	8%
45	Diklat Pembangunan Karakter Bangsa	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	120	200,000,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	40.74%	75.89%			21%	24%		
Predikat Kinerja																	SR	R			SR	SR		
10	Program Pendidikan Kelembagaan	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan kelembagaan	5	123,868,800	5	175,671,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	175,671,100	100%	99%	
1	Pendidikan Perencanaan Struktural Bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti diklat jabatan struktural (Orano)	5	180,000,000	5	175,671,100	-	0							0	0	0	0	0	5	175,671,100	100%	98%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	8.69%	8.69%			87%	89%		
Predikat Kinerja																	SR	SR			R	R		

7) Ditai oleh Kepala BAPPEDA DAN LITBANG

Keterangan :

- Ditai setiap intended
- Ditai perlu ditai
- Ditai hanya pada bleuler /V saja

Keterangan:

Skala Pendidikan Peringkat Kinerja

- 1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
- 2 76% ≤ 90% Tinggi
- 3 66% ≤ 75% Sedang
- 4 51% ≤ 65% Rendah
- 5 < 50% Sangat Rendah

Dibuat  
Pangkalpinang, 05 Januari 2021

PL KEPALA BKPSDM  
KOTA PANGKALPINANG

Eko Budi Hartono, S.Sos., M.Si  
NP. 196410271985031004

Dievaluasi  
Pangkalpinang, Tanggal \_\_\_\_\_

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG  
KOTA PANGKALPINANG

( \_\_\_\_\_ )

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020**

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
 BULAN : Triwulan IV

No	Program	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi						
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan		Fisik (%)				
							Rp	(%)					
1	Program Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	49,400,000	47,500,000	43,244,120	91.04	100				
		2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	bulan	147,000,000	131,840,000	131,240,000	99.54	100				
		3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	bulan	51,100,000	46,860,000	46,860,000	100.00	100				
		4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12	bulan									
		5. Penyediaan alat tulis kantor - Belanja alat tulis kantor	12	bulan			13,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100		
		6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan			18,200,000	4,550,000	4,550,000	100.00	100		
		7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor -Belanja alat listrik dan elektronik	12	bulan					3,000,000	2,233,000	1,953,000	87.46	100
		8. Penyediaan peralatan rumah tangga	12	bulan			4,000,000	2,560,000	2,500,000	97.66	100		
		9. Penyediaan makanan dan minuman	12	bulan			19,960,000	4,440,000	2,940,000	66.22	100		
		10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	bulan			154,745,817	74,640,141	73,466,542	98.43	100		

No	Program	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan		Fisik (%)
							Rp	(%)	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	unit	29,500,000	21,300,000	21,300,000	100.00	100
		2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5	unit	140,000,000	118,989,000	115,227,798	96.84	100
		3 Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1	unit	5,500,000	-	0	0.00	8
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan pelatihan formal -Belanja jasa kontribusi	10	orang	20,723,447	9,400,000	9,400,000	100.00	100
		2 Peninjauan masa kerja dan Peningkatan Pendidikan PNS	25	orang	18,110,000	19,250,000	18,561,000	96.42	100
		3 Sosialisasi Anti Narkoba	46	orang	7,500,000	-	0	0.00	0
4	Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	dok	5,000,000	4,940,000	4,940,000	100.00	100
		2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1	dok	5,000,000	4,290,000	4,060,000	94.64	100
		3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	dok	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100
		4 Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	3	dok	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100
		5 Forum Perangkat Daerah	30	peserta	5,000,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100
		6 Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	dok	5,000,000	-	0	0.00	17

No	Program	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan		Fisik (%)
							Rp	(%)	
5	Program Kepegawaian Daerah	1. Pendidikan Penjurangan Struktural Bagi PNS	5	orang	122,990,000	6,118,800	6,118,800	100.00	100
		2. Proses Penyelesaian Cuti bagi PNS Kota Pangkalpinang	10	orang	40,500,000	27,350,000	24,400,000	89.21	100
		3. Pelatihan Dasar bagi CASN Daerah	50	orang	1,295,000	-	0	0.00	8
		4. Uji Kompetensi bagi ASN Kota Pangkalpinang	18	orang	164,965,000	113,900,600	113,900,600	100.00	100
		5. Pelatihan Pengukuran Indeks Profesional ASN	70	orang	49,064,000	-	0	0.00	8
		6. Workshop Pengembangan Kompetensi PNS	70	orang	40,064,000	-	0	0.00	8
		7. Penyusunan rencana pembinaan karir ASN	10	kali	112,000,000	106,500,000	96,025,000	90.16	100
		8. Peningkatan dan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara	5	kasus	39,175,000	24,600,000	24,452,800	99.40	100
		9. Seleksi Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum	166	orang	512,200,000	431,578,762	401,176,161	92.96	100
		10. Pengelolaan Administrasi CASN menjadi ASN	250	orang	28,900,000	19,600,000	18,900,000	96.43	100
		11. Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	600	orang	124,477,000	125,239,500	112,412,227	89.76	100
		12. Pengembangan / Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ( SAPK )	3000	data	260,514,050	246,389,194	246,289,194	99.96	100
		13. Penyusunan Formasi Pegawai	250	formasi	21,700,000	9,193,500	9,193,500	100.00	100
		14. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Memiliki Masa Kerja 10, 20, 30 Tahun	200	orang	31,326,686	15,866,000	13,150,000	82.88	100

No	Program	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keuangan		Fisik (%)	
							Rp	(%)		
		15	Pengelolaan administrasi pensiunan PNS	90	orang	64,250,000	65,500,000	59,199,000	90.38	100
		16	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS	7	orang	134,250,000	43,010,600	28,610,600	66.52	92
		17	Penyelesaian karpeg, karis, karsu, taperrum, askes dan taspen	150	orang	35,000,000	11,750,000	9,950,000	84.68	100
		18	Pengelolaan dan Pengembangan Website Kepegawaian	2	website	37,250,000	24,425,000	24,175,000	98.98	100
		19	Penataan Arsip Kepegawaian	50	meter	14,900,000	-	0	0.00	8
		20	Pengelolaan Administrasi dalam Jabatan Fungsional	30	orang	40,000,000	40,000,000	39,143,000	97.86	100
		21	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	3	kali	136,600,000	245,224,159	163,615,142	66.72	100
		22	Seleksi Mutasi PNS ( Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar )	30	orang	48,050,000	6,811,238	6,811,238	100.00	100
		23	Pengelolaan dan Pengembangan Elektronik Sistem Management Informasi Layanan Kepegawaian Daerah ( E-SMILE)	1	jenis	116,700,000	118,300,000	116,200,000	98.22	100
		24	Pembinaan pegawai KORPRI	1	kali	171,000,000	-	0	0.00	0
		25	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kafilah MTQ Korpri	5	jenis	114,000,000	-	0	0.00	8
		26	Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	100	orang	99,040,000	113,000,000	102,418,240	90.64	100
		27	Pengelolaan E-LHKPN	43	orang	108,050,000	47,625,100	45,625,100	95.80	100
Total sampai dengan bulan ini						3,400,000,000	2,368,274,594	2,175,448,062	92	100

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Analisis kinerja pelayanan BKPSDMD Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kepegawaian merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan”**, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
2. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;



5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2020, maka dapat diuraikan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					1067 341	1035 308	1008 273	100	BKPSDMD
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 1408	95 1343	90 1281	7.8	
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 99	95 95	90 90	100	
Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%					77	78	79	79	

NO	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			54.69	55.37	61.50	67.62	54.69		61.50	67.62	
2	Indeks Reformasi Birokrasi (Sub komponen penataan system manajemen SDM)			-	62.50	63	63.50	NA		63	63.50	
3	Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik			-	80	85	90	NA		85	90	
4	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian			-	70	75	80	NA		75	80	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDMD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi BKPSDMD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu strategis di bidang kepegawaian, adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan penempatan ASN yang disesuaikan dengan kompetensi Jabatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan formasi jabatan fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Selain isu-isu penting di atas, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tupoksi OPD antara lain :

Permasalahan :

1. Aparatur Sipil Negara tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi).
2. Ketidaksihesuaian pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja terhadap jabatan.
3. Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi dan pendidikan dan pelatihan formal kepada seluruh pegawai dikarenakan keterbatasan anggaran.
4. Promosi terbuka hanya terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
5. Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja.
6. Absensi belum terintegrasi dengan sistem pembayaran tunjangan kinerja pegawai
7. Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik.
8. Arsip data pegawai dari PNS masih belum masuk semuanya ke BKPSDMD.

Penghambat :

1. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian belum optimal.
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.

Pendorong :

1. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
2. Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat.
3. Adanya kewenangan dalam manajemen dibidang kepegawaian.

Kekuatan :

Sedangkan kekuatan (*strenght*) yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur.
2. Kemauan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya semangat belajar dari sumber daya aparatur.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6	
	Persentase ASN yang disiplin	Nilai	98,50			Persentase ASN yang disiplin	Nilai	98,50			
	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	Nilai	78,00			Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	Nilai	78,00			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		412	6.037.434.875		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		413	6.037.434.875		
	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9	13.750.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9	13.750.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA/ RENJA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	2	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA/ RENJA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	2	4.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	1	2.750.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	1	2.750.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	1	2.500.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	1	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang tersusun	Dokumen	2	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang tersusun	Dokumen	2	2.500.000	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen SPIP, LAKIP, dan RB)	Dokumen	3	2.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen SPIP, LAKIP, dan RB)	Dokumen	3	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target		Rp
1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>40</b>	<b>5.107.184.875</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>40</b>	<b>5.107.184.875</b>		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	35	5.094.184.875	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	35	5.094.184.875	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penataan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	1	2.500.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penataan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	1	2.500.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi SKPD	laporan	1	2.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi SKPD	laporan	1	2.500.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	3.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	3.000.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	dokumen	1	2.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	dokumen	1	2.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	laporan	1	3.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	laporan	1	3.000.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>			<b>2</b>	<b>4.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>			<b>2</b>	<b>4.000.000</b>	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	2.000.000	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	2.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah yang disusun	Laporan	1	2.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah yang disusun	Laporan	1	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6	
		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	100			Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	100		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>56</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>57</b>	<b>100.000.000</b>	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	unit	1	25.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	unit	1	25.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	47	35.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	47	35.000.000	
	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan ASN yang meninggal dunia	Orang	3	15.000.000	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan ASN yang meninggal dunia	Orang	3	15.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Orang	5	25.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Orang	5	25.000.000	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>129</b>	<b>207.500.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>129</b>	<b>207.500.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	11	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	11	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	set	12	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	set	12	10.000.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis	4	25.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis	4	25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Set	14	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Set	14	15.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	koran	3	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	koran	3	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	kali	35	125.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	kali	35	125.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata	berkas	50	12.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata	berkas	50	12.500.000	
		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	%	<b>100</b>			<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	%	<b>100</b>		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>2</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>2</b>	<b>30.000.000</b>	
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Unit	0	-	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Unit	0	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1	20.000.000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan	unit	1	10.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan	unit	1	10.000.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (termasuk tambah daya)	unit	0	-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (termasuk tambah daya)	unit	0	-	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	0	-	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	0	-	
		<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>			<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>168</b>	<b>395.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>168</b>	<b>395.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tertata	surat	50	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tertata	surat	50	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang	46	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang	46	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	unit	26	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	unit	26	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang	46	210.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang	46	210.000.000	
		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>6</b>	<b>180.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>6</b>	<b>180.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kenararan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	1	65.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kenararan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	1	65.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/lapangan yang dipelihara	Unit	4	110.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/lapangan yang dipelihara	Unit	4	110.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	-	
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0		- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0		- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0		
	KEPEGAWAIAN					KEPEGAWAIAN					
	Program Kepegawaian Daerah			7.770	1.437.500.000	Program Kepegawaian Daerah			7.770	1.437.500.000	
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			3.719	770.000.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			3.719	770.000.000	
	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	orang	200	75.000.000	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	orang	200	75.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	Orang	165	25.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	Orang	165	25.000.000	
	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	Orang	100	70.000.000	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	Orang	100	70.000.000	
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	event	3	110.000.000	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	event	3	110.000.000	
	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	data	3.000	350.000.000	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	data	3.000	350.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target	Rp	
1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	website	1	70.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	website	1	70.000.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola	orang	250	70.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola	orang	250	70.000.000	
		<b>Rasio pegawai fungsional</b>	<b>%</b>	<b>7,5</b>			<b>Rasio pegawai fungsional</b>	<b>%</b>	<b>7,5</b>		
	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>631</b>	<b>287.500.000</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>631</b>	<b>287.500.000</b>	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	Orang	20	150.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	Orang	20	150.000.000	
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	Orang	600	65.000.000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	Orang	600	65.000.000	
	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS		11	72.500.000	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS		11	72.500.000	
		<b>Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>165</b>	<b>295.000.000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>165</b>	<b>295.000.000</b>	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	Orang	100	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	Orang	100	100.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mempunyai sertifikasi sesuai dengan kompetensi dan keahlian dalam jabatan	Orang	25	40.000.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mempunyai sertifikasi sesuai dengan kompetensi dan keahlian dalam jabatan	Orang	25	40.000.000	
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	Orang	10	130.000.000	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	Orang	10	130.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	Orang	30	25.000.000	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	Orang	30	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target		Rp
1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6	
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78,00			Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78,00		
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>3.255</b>	<b>85.000.000</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>3.255</b>	<b>85.000.000</b>	
	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	orang	3.050	40.000.000	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	orang	3.050	40.000.000	
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	orang	200	22.500.000	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	orang	200	22.500.000	
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	kasus	5	22.500.000	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	kasus	5	22.500.000	
	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>			<b>250</b>	<b>1.175.000.000</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>			<b>250</b>	<b>1.175.000.000</b>	
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100		
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>			<b>100</b>	<b>175.000.000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>			<b>100</b>	<b>175.000.000</b>	
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	Orang	100	175.000.000	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	Orang	100	175.000.000	
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78,00			Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78,00		

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022		
				target	Rp				target		Rp
1	2	3	4	5	1	2	2	4	5	6	
	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		<b>150</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>			<b>150</b>	<b>1.000.000.000</b>		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	Orang	150	1.000.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	Orang	150	1.000.000.000	
				8.649.934.875					8.649.934.875		

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima (5) tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu :

***“Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)”***

#### **3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu :

***“Terlaksananya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi”***

Tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDMD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang**

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Jangka Menengah					Kondisi Akhir RPJMD
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59,07	59,11	61,39	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50
			Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)		Persentase ASN yang disiplin	Nilai	96.50	96.50	97.00	97.00	97.00	98.50	99.00	99.00
				Terlaksananya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	%	75	76	77	78	78	79	80	80



**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Tahun 2018-2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	%	47,76	53,29	58,82	64,35	69,88	75,41	80,94	80,94	BKPSDMD
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	54,15	54,69	55,37	61,50	67,62	78,50	95,51	95,51	
Indeks Reformasi Birokrasi sub komponen penataan sistem manajemen SDM	Nilai	NA	NA	61,50	62,50	63,50	64,50	65,50	65,50	
Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	NA	NA	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100	
Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	%	NA	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					1067 341	1035 308	1008 273	100	BKPSDMD
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 1408	95 1343	90 1281	7.8	
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%					99 99	95 95	90 90	100	
Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%					77	78	79	79	

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi misi. Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan. Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program dijabarkan dalam 14 (Empat Belas) kegiatan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) sub kegiatan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **1.1 Rencana Program**

Pada Tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang terdiri dari :
  - Program Kepegawaian Daerah
  - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
  
2. Program Pendukung, yaitu :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### **1.2 Rencana Kegiatan**

1. Kegiatan Prioritas
  - 1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN.
    - b. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK.
    - c. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
    - d. Fasilitasi lembaga profesi ASN
    - e. Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN
    - f. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
    - g. Pengelolaan data kepegawaian
  - 2) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan :
    - a. Pengelolaan mutasi ASN
    - b. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
    - c. Pengelolaan promosi ASN
  - 3) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan :
    - a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN

- b. Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN
  - c. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
  - d. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan :
    - a. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
    - b. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
    - c. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
  - 5) Pengembangan Kompetensi teknis, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.
  - 6) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.
2. Kegiatan Pendukung
- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
    - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
    - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
    - d. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - e. Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
    - c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
    - d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
    - e. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
    - f. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
  - 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD

- b. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
  - b. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - c. Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas
  - d. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - b. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - c. Penyediaan bahan logistik kantor
  - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - g. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
- 6) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan mebel
  - b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  - c. Pengadaan aset tetap lainnya
  - d. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - c. Pemeliharaan aset tetap lainnya
  - d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - e. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

- f. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

**Tabel 4.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**KOTA PANGKALPINANG**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>412</b>	<b>15,474,381,850</b>			<b>432</b>	<b>4,143,993,500</b>	
		<b>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>%</b>	<b>100</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>9</b>	<b>-</b>			<b>10</b>	<b>-</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA/ RENJA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	2		Pendapatan Daerah	Dokumen	2		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	1		Pendapatan Daerah	Dokumen	1		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun	Dokumen	1		Pendapatan Daerah	Dokumen	1		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang tersusun	Dokumen	2		Pendapatan Daerah	Dokumen	3		
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen SPIP, LAKIP, dan RB)	Dokumen	3		Pendapatan Daerah	Dokumen	3		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>40</b>	<b>14,810,413,500</b>			<b>41</b>	<b>3,294,993,500</b>	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	35	14,810,413,500	Pendapatan Daerah	orang	36	3,294,993,500	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penataan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	1		Pendapatan Daerah	dokumen	1		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi SKPD	laporan	1		Pendapatan Daerah	laporan	1		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				1	2	3		4	5		6
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1		Pendapatan Daerah	laporan	1			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	dokumen	1		Pendapatan Daerah	dokumen	1			
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	laporan	1		Pendapatan Daerah	laporan	1			
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>			<b>2</b>	<b>0</b>			<b>2</b>	<b>0</b>		
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1		Pendapatan Daerah	Dokumen	1			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah yang disusun	Laporan	1		Pendapatan Daerah	Laporan	1			
		<b>Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>%</b>	<b>100</b>			
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>56</b>	<b>10,000,000</b>			<b>59</b>	<b>10,000,000</b>		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	unit	1		Pendapatan Daerah	unit	1			
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	47		Pendapatan Daerah	Stel	47			
	Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan ASN yang meninggal dunia	Orang	3		Pendapatan Daerah	Orang	6			
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	Orang	5	10,000,000	Pendapatan Daerah	Orang	5	10,000,000		
		<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>%</b>	<b>100</b>			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>129</b>	<b>282,291,050</b>			<b>132</b>	<b>315,000,000</b>		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
				1	2	3		4	5	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	11	4.439.000	Pendapatan Daerah	Jenis	11	5,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	set	12	2.940.000	Pendapatan Daerah	set	15	3,000,000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	jenis	4	76.201.000	Pendapatan Daerah	jenis	4	82,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Set	14	48.711.050	Pendapatan Daerah	Set	14	50,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	koran	3		Pendapatan Daerah	koran	3		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	kali	35	150.000.000	Pendapatan Daerah	kali	35	175,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata	berkas	50		Pendapatan Daerah	berkas	50		
		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>%</b>	<b>100</b>		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>2</b>	<b>-</b>			<b>12</b>	<b>100,000,000</b>	
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Unit	0	-	Pendapatan Daerah	Unit	4		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1		Pendapatan Daerah	unit	0		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan	unit	1		Pendapatan Daerah	unit	4	100,000,000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (termasuk tambah daya)	unit	0	-	Pendapatan Daerah	unit	2		
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	0	-		unit	2		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				1	2	3		4	5		6
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100			%	100			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>168</b>	<b>276,905,500</b>			<b>168</b>	<b>275,600,000</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tertata	surat	50		Pendapatan Daerah	surat	50			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang	46	105.900.000	Pendapatan Daerah	orang	46	85,600,000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	unit	26	10.993.000	Pendapatan Daerah	unit	26	25,000,000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	orang	46	160.012.500	Pendapatan Daerah	orang	46	165,000,000		
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100			%	100			
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>6</b>	<b>94,771,800</b>			<b>8</b>	<b>148,400,000</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kenararan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	1	34,873,400	Pendapatan Daerah	Unit	1	40,000,000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/lapangan yang dipelihara	Unit	4	38,400,000	Pendapatan Daerah	Unit	4	58,400,000		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	-	Pendapatan Daerah	Unit	1			
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1		Pendapatan Daerah	Unit	0	-		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0	21,498,400	Pendapatan Daerah	Unit	0	50,000,000		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
				5	6	7		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0	-	Pendapatan Daerah	Unit	1		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara	Unit	0	-	Pendapatan Daerah	Unit	1		
<b>KEPEGAWAIAN</b>										
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>				<b>7,770</b>	<b>758,165,600</b>			<b>7,871</b>	<b>817,927,688</b>	
		<b>Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>%</b>	<b>100</b>		
<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>				<b>3,719</b>	<b>389,320,600</b>			<b>3,734</b>	<b>398,410,600</b>	
	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	orang	200	17,700,000	Pendapatan Daerah	orang	200	17,700,000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	Orang	165	8,160,000	Pendapatan Daerah	Orang	165	10,000,000	
	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	Orang	100	2,750,000	Pendapatan Daerah	Orang	100	10,000,000	
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	event	3	51,000,000	Pendapatan Daerah	event	3	51,000,000	
	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	data	3,000	246,860,600	Pendapatan Daerah	data	3,000	246,860,600	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	website	1	25,350,000	Pendapatan Daerah	website	1	25,350,000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola	orang	250	37,500,000	Pendapatan Daerah	orang	265	37,500,000	
		<b>Rasio pegawai fungsional</b>	<b>%</b>	<b>7.5</b>			<b>%</b>	<b>7.5</b>		
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>				<b>631</b>	<b>186,930,000</b>			<b>637</b>	<b>186,930,000</b>	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
				1	2	3		4	5	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	Orang	20	107,670,000	Pendapatan Daerah	Orang	25	107,670,000	
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	Orang	600	36,860,000	Pendapatan Daerah	Orang	600	36,860,000	
	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS		11	42,400,000	Pendapatan Daerah		12	42,400,000	
		<b>Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>%</b>	<b>100</b>		
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>165</b>	<b>164,400,000</b>			<b>195</b>	<b>177,587,088</b>	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	Orang	100	58,150,000	Pendapatan Daerah	Orang	125	60,000,000	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mempunyai sertifikasi sesuai dengan kompetensi dan keahlian dalam jabatan	Orang	25		Pendapatan Daerah	Orang	25		
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	Orang	10	104,000,000	Pendapatan Daerah	Orang	15	104,000,000	
	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	Orang	30	2,250,000	Pendapatan Daerah	Orang	30	13,587,088	
		<b>Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi</b>		<b>78.00</b>				<b>78.00</b>		
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>3,255</b>	<b>17,515,000</b>			<b>3,305</b>	<b>55,000,000</b>	
	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	orang	3,050	6,810,000	Pendapatan Daerah	orang	3,100	20,000,000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
				1	2	3		4	5	
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	orang	200	8,830,000	Pendapatan Daerah	orang	200	20,000,000	
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	kasus	5	1,875,000	Pendapatan Daerah	kasus	5	15,000,000	
	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			250	1,134,780,000			200	900,000,000	
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100			%	100		
	Pengembangan Kompetensi Teknis			100	93,300,000			150	100,000,000	
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	Orang	100	93,300,000	Pendapatan Daerah	Orang	150	100,000,000	
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78.00				78.00		
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			150	1,041,480,000			50	800,000,000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	Orang	150	1,041,480,000	Pendapatan Daerah	Orang	50	800,000,000	
					17,367,327,450				5,861,921,188	

Tabel 4.2  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023  
KOTA PANGKALPINANG

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>KEPEGAWAIAN</b>									
	Program Kepegawaian Daerah			7,770	758,165,600			7,871	817,927,688	
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100			%	100		
	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			3,719	389,320,600			3,734	398,410,600	
	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	orang	200	17,700,000	Pendapatan Daerah	orang	200	17,700,000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	Orang	165	8,160,000	Pendapatan Daerah	Orang	165	10,000,000	
	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	Orang	100	2,750,000	Pendapatan Daerah	Orang	100	10,000,000	
	Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	event	3	51,000,000	Pendapatan Daerah	event	3	51,000,000	
	Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	data	3,000	246,860,600	Pendapatan Daerah	data	3,000	246,860,600	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	website	1	25,350,000	Pendapatan Daerah	website	1	25,350,000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola	orang	250	37,500,000	Pendapatan Daerah	orang	265	37,500,000	
		<b>Rasio pegawai fungsional</b>	%	7.5			%	7.5		
	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			631	186,930,000			637	186,930,000	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	Orang	20	107,670,000	Pendapatan Daerah	Orang	25	107,670,000	
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	Orang	600	36,860,000	Pendapatan Daerah	Orang	600	36,860,000	
	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS		11	42,400,000	Pendapatan Daerah		12	42,400,000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100			%	100		
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			165	164,400,000			195	177,587,088	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	Orang	100	58,150,000	Pendapatan Daerah	Orang	125	60,000,000	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mempunyai sertifikasi sesuai dengan kompetensi dan keahlian dalam jabatan	Orang	25		Pendapatan Daerah	Orang	25		
	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	Orang	10	104,000,000	Pendapatan Daerah	Orang	15	104,000,000	
	Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	Orang	30	2,250,000	Pendapatan Daerah	Orang	30	13,587,088	
		<b>Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi</b>		78.00				78.00		
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			3,255	17,515,000			3,305	55,000,000	
	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	orang	3,050	6,810,000	Pendapatan Daerah	orang	3,100	20,000,000	
	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	orang	200	8,830,000	Pendapatan Daerah	orang	200	20,000,000	
	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	kasus	5	1,875,000	Pendapatan Daerah	kasus	5	15,000,000	
	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>			250	1,134,780,000			200	900,000,000	
		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100			%	100		
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>			100	93,300,000			150	100,000,000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	Orang	100	93,300,000	Pendapatan Daerah	Orang	150	100,000,000	
		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		78.00				78.00		
	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>			150	1,041,480,000			50	800,000,000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan, Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	Orang	150	1,041,480,000	Pendapatan Daerah	Orang	50	800,000,000	
					1,892,945,600				1,717,927,688	



## **BAB V PENUTUP**

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 nantinya akan menjadi bahan untuk penetapan Rencana Kerja Definitif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022. Dalam Rancangan Akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merencanakan 3 (tiga) program yang dijabarkan dalam 14 (Empat Belas) kegiatan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) Sub Kegiatan.

Sebagai penutup, apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sebagai OPD pengelola kepegawaian Kota Pangkalpinang.